Merancang Skenario Pengawasan Desa di Era UU No. 6 Tahun 2014

Oleh: **Rendy A. Diningrat**

Peneliti, Lembaga Penelitian SMERU

FKP - Jakarta, 17 Oktober 2017

smeru RESEARCH INSTITUTE

LOCAL SOLUTIONS TO POVERTY

Latar Belakang

- DD semakin menjadi sorotan
  - Kasus penyelewengan DD semakin banyak terungkap
  - OTT Bupati dan Kejaksaan Pamekasan menjadi “gong”
- Pernyataan pers ICW (2017):
  - Terdapat 110 kasus korupsi DD sepanjang 2016-Agustus 2017
  - Melibatkan 139 pelaku: 107 kades, 30 perangkat, dan 2 istri kades
  - Kerugian negara 30M (2017) dari 10,4M (2016)
  - Modus: penggelpan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungli, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap

- Semua pihak tampak perlu dilibatkan

TRENDING PERISTIWA POLITIK JAKARTA UANG DUNIA KHAS PROPERTI TRAVEL VID

Merdeka > Peristiwa

Jika temukan indikasi penyelewengan dana desa, hubungi nomor 1500040

Senin, 7 Agustus 2017 14:53
Reporter : Supriatin

118 SHARES

Mendes PDT Eko Putro Sandjojo. ©2017 Merdeka.com

KPK Akan Awasi Penggunaan Dana Desa

Polri Akan Teken MoU dengan Kemendes untuk Pengawasan Dana Desa

NEWS KHAZANAH SEPAKBOLA OTO-TEK LEISURE INPICTURE VIDEO PUBLIKA EKONOMI

NASIONAL INTERNASIONAL OLAHRAGA PENDIDIKAN DAERAH SENATOR INDONESIA

KPK Kerja Sama dengan Ditjen Pajak Cegah Korupsi Dana Desa

Densus Tipikor Diyakini Bisa Cegah Korupsi Dana Desa

OKEZONE NEWS

100001_Domain has been blocked (Zone1d_1019080)

HOME NASIONAL MEGAPOLITAN INTERNATIONAL NUSANTARA KAMPUS AUTOS TOKOH FOTO VIDEO

HOME // NEWS // NASIONAL

TNI Akan Dilibatkan dalam Pengawasan Penyaluran Dana Desa

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Kamis, 7 September 2017 - 20:31 WIB

Misbakhun: BPK Harus Lakukan Pemeriksaan Dana Desa

Agregasi Antara, Jurnalis · Jum'at, 15 September 2017 - 05:02 WIB

CNN Indonesia Home Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Hiburan Gaya Hid

Home > Nasional > Berita Peristiwa

Cegah Penyelewengan, Tjahjo Minta Alumni IPDN Awasi Dana Desa

Bagikan :

Sekilas Studi

- Studi Kualitatif Logitudinal “Implementasi UU Desa"

No	Provinsi	Kabupaten	Desa (*pseudonym*)
1	Jambi	Batang Hari	a. Tiang Berajo (TBJ) b. Kelok Sungai Besar (KSB)
		Merangin	a. Sipahit Lidah (SPL) b. Pinang Merah (PNM)
2	Jawa Tengah	Wonogiri	a. Kalikromo (KLK) b. Beral (BRL)
		Banyumas	a. Deling (DLG) b. Karya Mukti (KYM)
3.	NTT	Ngada	a. Ndona (NDO) b. Lekosoro (LKS)

Fakta Dana Desa

- Rerata DD per desa terus meningkat: Rp280 juta (2015); Rp565 juta (2016); dan Rp720 juta (2017).
- Lebih dari 60% APBDes untuk infrastruktur; 30% pemerintahan; sisanya pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan
- Ekspektasi besar?

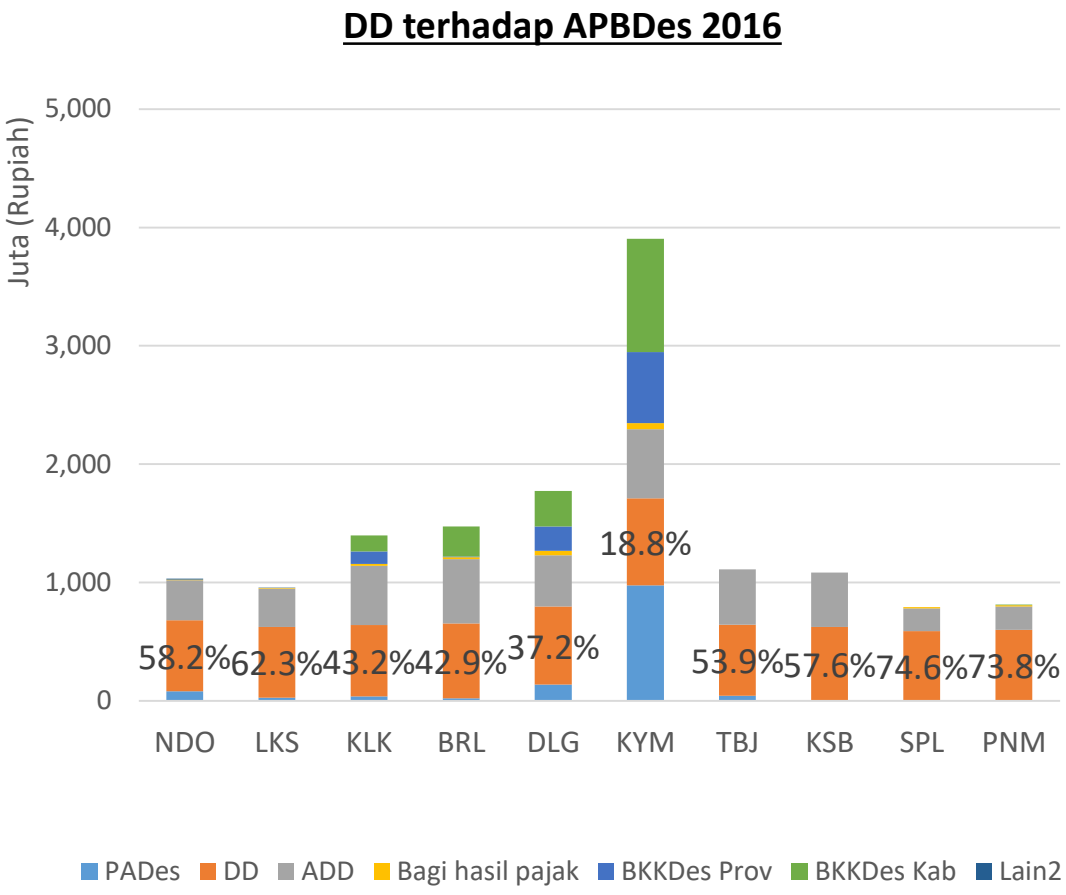

- Kelemahan-kelemahan dalam implementasi UU Desa
  - Kesiapan Pemerintah Desa
  - Terbatasnya keterlibatan masyarakat dan LKD
  - Belum optimalnya peran BPD
  - Pendamping desa masih dihujani kritik
  - Kesiapan supradesa
  - Cost politik terlalu tinggi (?)

Tantangan membuat pengawasan berjalan efektif tanpa lensa "berburu".

Regulasi Pengawasan Desa Saat Ini

- Selalu dilekatkan dengan proses pembinaan oleh supradesa
- Akuntabilitas masih dipandang sebagai bentuk pelaporan pasca pelaksanaan
- Belum ada payung hukum spesifik yang mengatur mekanisme (skenario) pengawasan pemanfaatan DD secara lebih operasional dan sistematis

Praktik Pengawasan Saat Ini

BPKP/ Inspektorat

- Sistem acak, hanya pada akhir tahun anggaran
- Keterbatasan personil serta pemahaman UU Desa dan turunannya

OPD Daerah/ Kecamatan

- Masih dominan urusan administratif
- Pelimpahan ke kecamatan: sangat bergantung pada kapasitas masing-masing kecamatan dan pengawasan OPD Daerah

Desa

- BPD terkendala kapasitas
- Belum banyak bukti memadai masyarakat melakukan pengawasan
- Tantangan kepedulian, daya kritis, proaktif, dan *ewuh pakewuh*

Akuntabilitas Hari Ini

- Studi Baseline Kualitatif (yang berlaku hingga sekarang) menunjukkan bahwa akuntabilitas baru dipraktikkan secara vertical ke atas
- Studi Baseline Kuantitatif: 32.4% warga desa tidak tertarik dengan urusan pemerintahan desa (LSP World Bank dilakukan akhir 2015)

Semua desa studi sepakat pengawasan penting dan perlu dilakukan sejak perencanaan

NEWS KHAZANAH SEPAKBOLA OTO-TEK LEISURE INPICTURE VIDEO INFOGRAFIS PUBLIKA

Masyarakat Diharapkan Punya Andil Awasi Penggunaan Dana Desa

Pemerintah Ajak Masyarakat Awasi Penggunaan Dana Desa

merdeka.com

GRAND SALE
RP 319 rb

ICW minta masyarakat aktif berperan awasi penyaluran dana desa

NEWS KHAZANAH SEPAKBOLA OTO-TEK LEISURE INPICTURE VIDEO INFOGRAFIS PUBLIKA

Jokowi Minta Masyarakat Ikut Awasi Dana Desa

Lembaga Pemasyarakatan Wanita

Masyarakat Perlu Ikut Mengawasi

Presiden: Dana Desa Jangan Diselewengkan

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para kepala desa untuk berhati-hati, tidak menyelewengkan dana desa. Pasalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk dana desa dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peringatan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam acara silaturahim kepala desa se-Banten di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (4/10). Presiden mengumumkan, sampai saat ini sudah lebih dari 900 desa yang tersangkut masalah hukum karena salah mengelola dana desa.

"Di Indonesia ada 74.000 desa. Sampai tahun ini ada lebih kurang 900 desa yang punya masalah. Hati-hati betul, desanya ditangkap karena menyeweng-kan dana desa. Saya tidak main-main-main," tuturnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh masyarakat turut mengawasi penggunaan dana desa. Jangan sampai dana desa yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa.

Semestinya dana desa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, irigasi, embung, dan kebutuhan desa lainnya. Tidak hanya itu, pembangunan dengan biaya dana desa juga harus dikerjakan oleh masyarakat desa. Dengan begitu, perputaran uang di desa tetap ada.

"Pembangunan pakai tenaga kerja di desa, bahan baku di desa, sehingga uang itu tetap berputar di desa, jangan sampai kalau. Kuncinya ada di situ," kata Presiden.

Setiap tahun pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Selama tiga tahun terakhir, tanpa Jokowi, pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp 137 triliun. Tahun 2015 setiap desa rata-rata memperoleh Rp 300 juta, tahun 2016 Rp 600 juta, dan tahun 2017 sebesar Rp 800 juta. "Ini saya [illegible] kesejahteraan masyarakatnya belum meningkat, berarti ada yang salah. Pasti ada [illegible]," kata Presiden.

Sidang suap

Dalam sidang perkara suap untuk auditor Tim Pemeriksa Keuangan agar laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), salah satu terdakwa Sugito mengakui kedatangannya ke kantor BPK pada 4 Mei 2017 untuk mengonfirmasi permintaan uang dari salah satu auditor BPK. Permintaan uang itu sebagai imbalan karena Kemendes PDTT mendapat laporan keuangan WTP dari BPK.

Sugito adalah mantan Inspektur Jenderal Kemendes PDTT yang menjadi terdakwa pemberi suap. Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin, menghadirkan saksi mantan auditor utama BPK, Rochmadi Saptogiri, yang juga tersangka penerima suap dalam kasus ini.

Sugito mengaku, kedatangannya ke BPK pada 4 Mei bertujuan mengonfirmasi ke Rochmadi terkait permintaan imbalan oleh Chairul Anam, auditor BPK. Hal itu karena sejak 27 April 2017, Anam terus mendesak dirinya agar memberi imbalan.

Sugito menuturkan, dirinya ke BPK bersama Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo. Seusai pertemuan antara Eko dan anggota VII BPK, Eddy Mulyadi, Sugito mengaku bertemu Rochmadi di ruang bersama. Kesempatan itu dimanfaatkan Sugito untuk mengonfirmasi permintaan Anam.

Sesuai dakwaan terhadap Sugito, jatah melunya bersumber dari [illegible] sebesar Rp 250 juta. Namun, dalam realisasinya menjadi Rp 240 juta yang disampaikan pada 10 Mei sebesar Rp 200 juta dan Rp 40 juta pada 26 Mei saat operasi tangkap tangan berlangsung.

"Kesempatan itu bertemuan dengan Rochmadi saya cross-check apa benar Anam mengajar-ngajar saya untuk meminta imbalan. Menanggapi pertanyaan saya, Rochmadi mengampaikan agar saya tak melalui Anam, tetapi yang lain saja, melalui Ali Indi," kata Sugito.

(NTA/MPN/BAY/EDN)

Ndona, NGA

Anggota BPD membacakan anggaran dan rencana kerja pembangunan jalan setapak

The Accountability of Reasonableness (Daniels, 1998)

1. Relevance : Rationales, how to meet people needs
2. Publicity : Publically known
3. Appeal : Challenging the decisions
4. Enforcement : Ensuring/ Regulatory Process

Skenario Pengawasan Desa

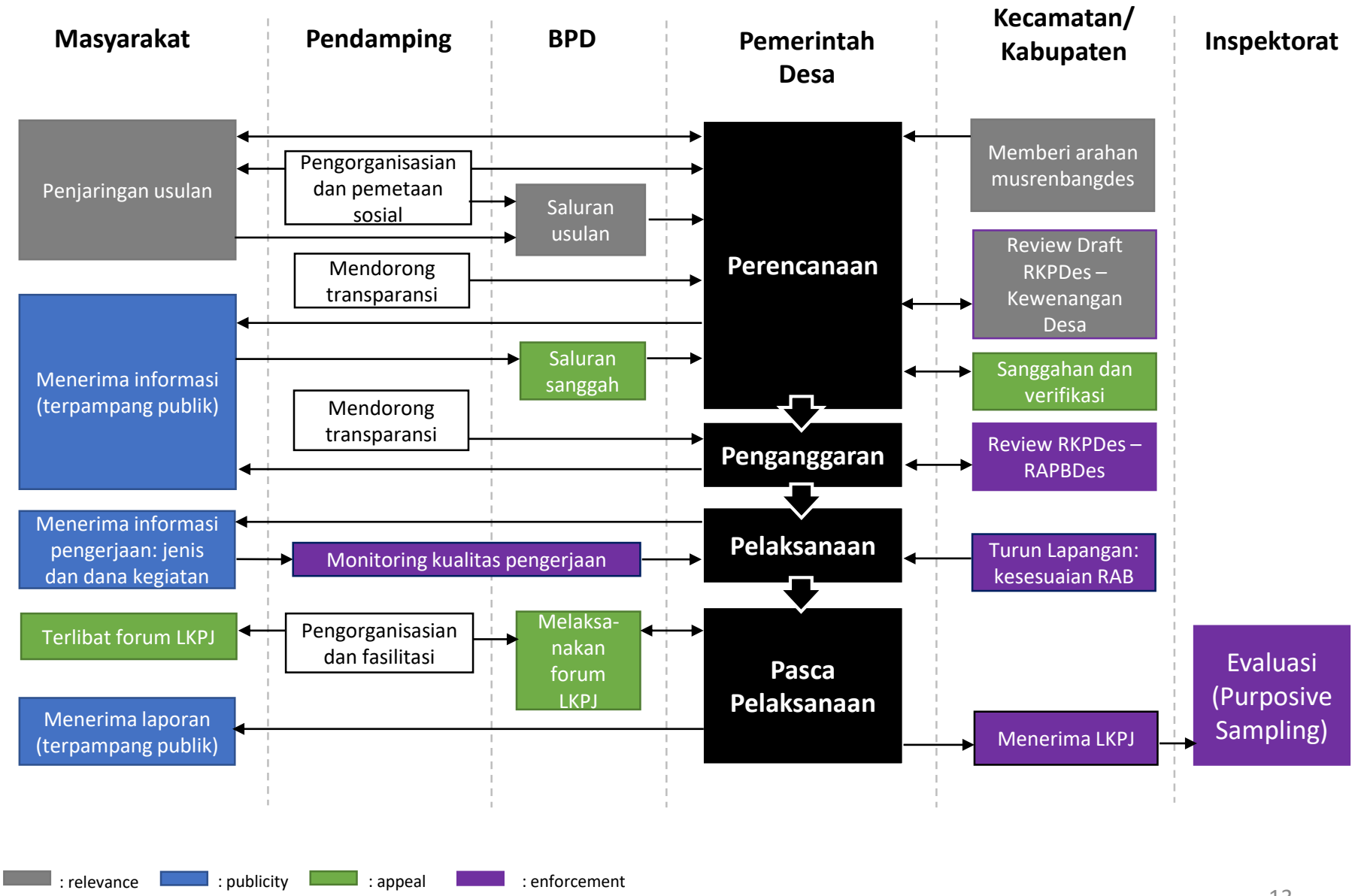

Skenario Pengawasan Desa

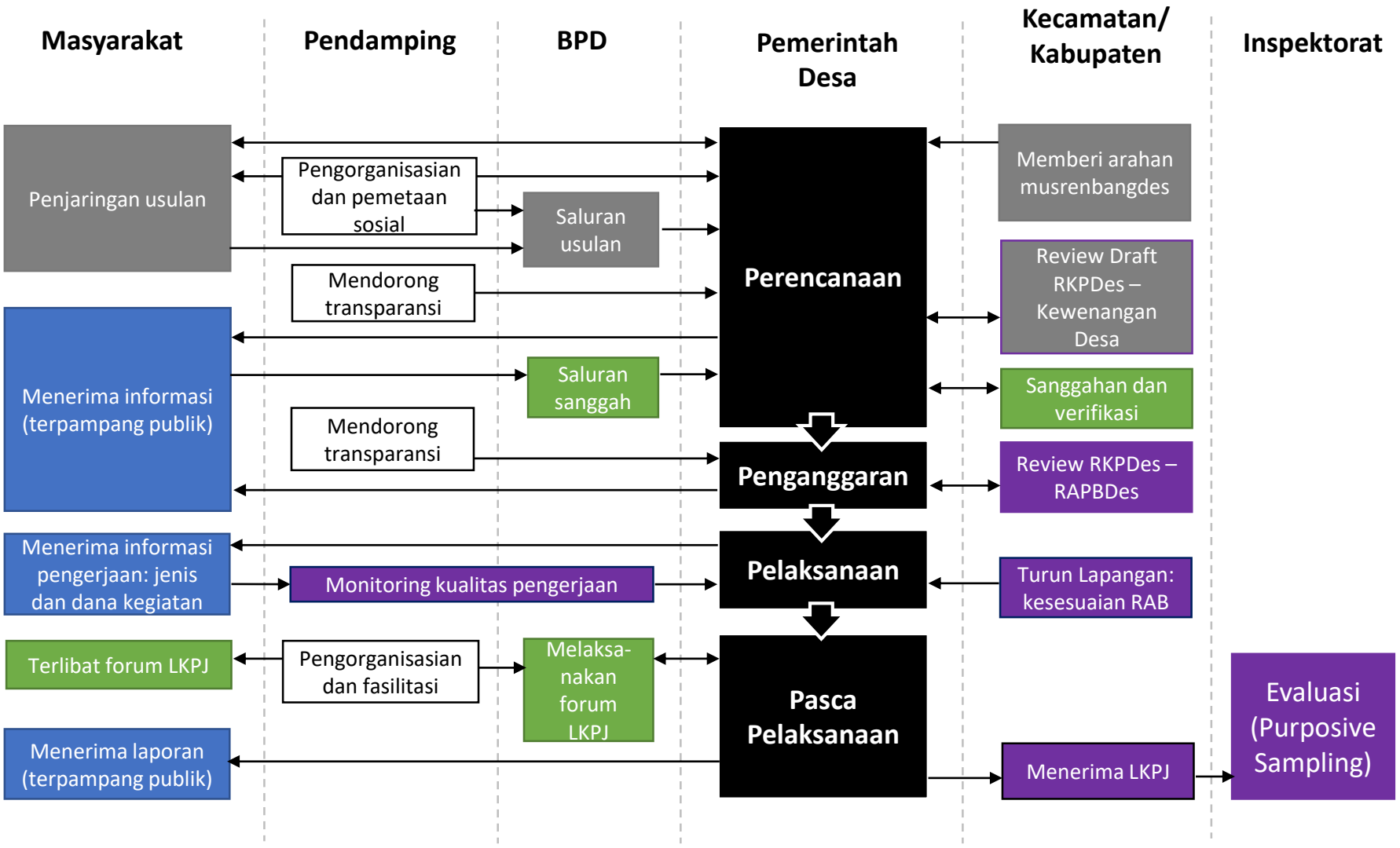

: relevance : publicity : appeal : enforcement

Terimakasih

facebook.com/SMERUInstitute

@SMERUInstitute

Kontak:

The SMERU Research Institute
Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330 Indonesia
Ph: (62-21) 3193 6336
Fax: (62-21) 3193 0850
Email: smeru@smeru.or.id